

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Adisasmita, Sakti A., 2011, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- CST Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, 2018, *Perbandingan Terminal Angkutan Jalan*, Ditjen Perhubungan Darat, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Arenawati, 2014, *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta
- Asep Muslim, 2007, *Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Perca, Jakarta
- Gareth R Jones, 1995, *Organizational Theory: Text and Cases Addition Wesley Publishing Company, Texas : , A & M University*
- Hasan M Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor
- H. Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hasibuan, H.P Malayu., 2001, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta
- Iqbal, Hasan. M, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor

- Jim Manis, 2005, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* by Adam Smith, Hazleton, The Pennsylvania State University, United States.
- Klaus Krispendoff, 1993. *Analisis Isi Pengantar Dan Teori Metodologi*, Rajawali Press, Jakarta
- L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, I.B, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Manullang, M., 2009, *Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan Keduapuluh Satu*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2002, *Ilmu Perundang-undangan Dasardasar dan Pembentukannya, cetakan ke-sebelas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Morlok, Edward K, 1991, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Erlangga, Jakarta
- Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- P. Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- R.D.H. Koesomahatmadja, 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung
- S Hendarto, H Al Rasyid, R Hermawan, 2001, *Dasar-Dasar Transportasi*, ITB, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Siagian, Sondang. P, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*. Binapura Aksara, Jakarta
- Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta

Silalahi, Ulbert, 1992, *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*, CV Sinar Baru, Bandung

Soejono Soekamto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Sumardjono, Maria S.W., 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Warpani, Suwardjoko, 1990, *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Penerbit ITB, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89)

Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 213)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1406)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1080)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1196)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/02/M.PAN/ 1/ 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 493)

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Seluruh Wilayah Indonesia

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 6251/AJ.104/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 Tahun 2003 tentang Simpul Jaringan Terminal Tipe A

Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang Dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi, UPTD Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Jambi

Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota Semarang

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Terminal dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya, Tambak Osowilangun dan Joyoboyo Kota Surabaya

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 29 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal

Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusatpemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas luasnya Menurut UUD 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Yogyakarta.

Akmal, 2006, “Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah”, Jurnal Demokrasi Vol. V No. 1 , Sumatera Barat

Ari Wibowo, 2017, *Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Fence M. Wantu, 2007, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta

Lukman Hakim, 2011, *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No.1

Masruroh Rahayu, 2019, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Pelabuhan Tanjung Priok*, Tesis, UGM MIH Jakarta, Jakarta

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan Jhon Rawls*” Jurnal Konstitusi , Volume XI

Sigit Anton Nugraha, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kerjasama Pengelolaan Terminal Khusus Untuk Melayani Kepentingan Umum Antara Unit Penyelenggara Pelabuhan Dengan Pengelola Terminal Khusus*, Tesis, MIH UGM Jakarta, Jakarta

Syauqi, 2016, *Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Sosio Informa Vol. 2, No. 01

Internet

Cahya Dicky Pratama, ”Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah”, <https://www.kompas.com/PembagianUrusanPemerintahPusatdanDaerah>, diakses tanggal 22 Februari 2021

Detik News, “Polemik Terminal Purabaya, Pemkot Surabaya Minta Pemkab Sidoarjo Tahu Diri”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2748540/>

polemik-terminal-purabaya-pemkot-surabaya-minta-pemkab-sidoarjo-tahu-diri. diakses tanggal 31 Maret 2021.

Ditjen Hubdat, “Sejarah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat”, <http://hubdat.dephub.go.id/profil-hubdat/sejarah-hubdat>, diakses tanggal 3 April 2021

Dwi Aditya Putra, “Menpan RB: Penyederhanaan Birokrasi untuk Mempercepat Pelayanan Masyarakat”, <https://www.merdeka.com/uang/menpan-rb-penyederhanaan-birokrasi-untuk-mempercepat-pelayanan-masyarakat.html>, diakses tanggal 7 April 2021

Kementerian Keuangan, “Sejarah PPK Badan Layanan Umum”, <http://blu.djpbk.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/page/view&id=>, diakses tanggal 11 April 2021

Mahardini Nur Afifah,” Transportasi Solo : Masuk Terminal Tirtonadi Kini Tak Perlu Bayar Retribusi”, <https://www.solopos.com/transportasi-solo-masuk-terminal-tirtonadi-kini-tak-perlu-bayar-retribusi-781003>, diakses tanggal 23 Februari 2021

Mangappu Pasaribu , “BLU: Bukan Korporasi Tapi Memberi Kontribusi Demi Pelayanan Yang Bernilai”,<https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/blu-bukan-korporasi-tapi-memberi-kontribusi-demi-pelayanan-yang-bernilai/>, diakses tanggal 11 April 2021

Nur Rohmi Aida, “Pidato Presiden Jokowi dalam Pelantikan Tekankan Penyederhanaan Eselon”, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/172806565/pidato-presiden-jokowi-dalam-pelantikan-tekan-penyederhanaan-eselon>, diakses tanggal 20 Maret 2021.

Setyo Aji Harjanto, “Penyederhanaan Birokrasi Akan Dilakukan Besar-besaran”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191020/9/1161165/presiden-jokowi-penyederhanaan-birokrasi-akan-dilakukan-besar-besaran>, diakses tanggal 7 April 2021

Serafica Gischa ”Kementerian Negara Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi” <https://www.kompas.com/>, diakses tanggal 20 Mei 2020

Salsabila Rachma, “Organisasi dan Pengorganisasian”, <https://www.kompasiana.com/organisasi-dan-pengorganisasian>, diakses tanggal 22 Februari 2021

Suparno, “Perubahan Wajah Terminal Purabaya Bungurasih”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3483043/perubahan-wajah-terminal-purabaya-bungurasih>, diakses tanggal 1 April 2021

TGR “Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah – UU No. 23/2014”,
<https://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014/> diakses tanggal 19 Februari 2021

Yudi Supriyanto, "Baru 54,54% Terminal Tipe A yang Diserahkan",
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20160901/98/580445/baru-5454-terminal-tipe-a-yang-diserahkan>, diakses 22 Februari 2021